

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan di Indonesia sebelum masa otonomi daerah dilaksanakan dalam suatu iklim birokrat dengan berbagai kebijakan yang harus dilaksanakan oleh sekolah. Akibatnya sekolah tidak dapat berbuat untuk mengembangkan programnya. Sekolah diharuskan melaksanakan segala keputusan dan kebijakan dari pemerintah pusat. Kepala sekolah dan para guru tidak dapat mengembangkan ide-ide yang dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi sekolah. Kepala sekolah dan para guru hanya sekedar melaksanakan kegiatan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang sudah ada. Penggunaan *School Based Management* (Manajemen Berbasis Sekolah) oleh Pemerintah Indonesia dalam kerangka meminimalisasi sentralisme pendidikan mempunyai implikasi yang signifikan bagi otonomi sekolah.

Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dilatarbelakangi dengan digulirkannya era otonomi daerah atas dasar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Pembagian Kewenangan antara Pusat dan Daerah. Hal ini telah membawa nuansa baru untuk melaksanakan desentralisasi pengelolaan pendidikan seiring dengan otonomi daerah. Secara operasional, kebijakan desentralisasi dimulai pada 1 Januari 2001. Diawali dengan pelimpahan sebagian wewenang pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Konsekuensinya bahwa telah terjadi restrukturisasi kelembagaan pemerintah, termasuk di dalamnya bidang pendidikan. Implementasi MBS merupakan suatu bidang reformasi pendidikan untuk meningkatkan kualitas

pendidikan bangsa Indonesia yang kini semakin tertinggal jauh dari negara-negara lain. Dengan diberlakukannya konsep MBS akan berdampak langsung terhadap pengelolaan pendidikan di Indonesia.

Pemberlakuan dari UU No. 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah dan Undang-Undang No. 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah membawa perubahan terhadap kewenangan yang luas kepada sekolah untuk mengatur kepentingan warga sekolah. Sekolah diberikan kesempatan yang luas dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan masalah keuangan, pelaksanaan pembelajaran, sarana dan prasarana sekolah serta seluruh komponen penunjang lainnya. Kristalisasi dan upaya tersebut di atas tampak dalam penerapan konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBS).

Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan pendidikan dengan menawarkan berbagai konsep yang sudah mulai diterapkan seperti konsep MBS, KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan), Pendidikan Berbasis Luas (*Broad Based Education*), dan Pendidikan Kecakapan Hidup (*Life Skill*). Beberapa konsep tersebut merupakan perubahan atau reformasi pendidikan yang sebenarnya semuanya masih saling berkaitan walaupun hanya penekanannya saja yang berbeda. Konsep MBS adalah konsep yang lebih menekankan kepada pengelolaan manajemen di sekolah. Manajemen Berbasis Sekolah lebih memberikan kebebasan kepada sekolah dalam merencanakan dan melaksanakan pengembangan sekolah.

Latar belakang penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di sekolah menurut Pusat Pengembangan Penataran Guru Tertulis, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Nasional (2004) adalah:

- a. Reformasi sekolah (*school reform*) merupakan suatu konsep perubahan ke arah Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS), yang selanjutnya
- b. sebagai kerangka dasar dalam peningkatan mutu pendidikan di Indonesia, salah satunya dengan penerapan MBS.
- c. Reformasi sekolah mempunyai makna yang sangat luas, bukan hanya terbatas pada pengelolaan pendidikan di tingkat sekolah saja, tetapi mencakup keseluruhan sistem penyelenggaraan pendidikan. Perubahan dalam dunia pendidikan dimaksud merupakan keharusan untuk menjawab tuntutan pendidikan itu sendiri.
- d. Kebijakan reformasi sekolah dikembangkan dengan mengacu pada konsep “sekolah efektif” yaitu sekolah yang memiliki profil mandiri, inovatif dan memberikan iklim yang kondusif bagi warga sekolah untuk mengembangkan sikap kritis, kreatif dan secara bersama-sama mewujudkan pendidikan yang bermutu.

Beberapa alasan dan pertimbangan dilaksanakannya Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) menurut Pusat Pengembangan Penataran Guru Tertulis, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Nasional (2004) adalah :

- a. Sekolah lebih mengetahui keadaan dirinya (baik berupa kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman bagi dirinya dibandingkan dengan institusi lainnya, sehingga sekolah dapat mengoptimalkan dalam pemberdayaan sumber daya yang dimiliki. Sekolah diharapkan lebih mandiri dalam mengembangkan program sekolah dalam upaya mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan.

- b. Sekolah lebih mengetahui kebutuhan lembaga, khususnya berkaitan dengan input (masukan) dan out put (keluaran) pendidikan yang akan dikembangkan dan didayagunakan dalam proses pendidikan.
- c. Pengambilan keputusan relatif lebih tepat dan akurat, karena dilakukan oleh pihak sekolah yang lebih tahu permasalahannya, serta dibantu oleh masyarakat sehingga di samping dapat menghasilkan keputusan yang tepat dan akurat juga dapat menciptakan transparansi dan iklim demokrasi yang sehat.
- d. Keterlibatan masyarakat dalam mengontrol sekolah melahirkan efektifitas dan efesiensi penggunaan sumber daya pendidikan secara maksimal.
- e. Terjadi kompetisi yang sehat di antara masing-masing sekolah untuk lebih meningkatkan kualitas pendidikan melalui upaya inovatif dengan dukungan orang tua peserta didik, masyarakat dan pemerintah.
- f. Sekolah dituntut untuk mempertanggungjawabkan mutu pendidikan kepada pemerintah, orang tua peserta didik dan masyarakat pada umumnya. Sekaligus sekolah dapat secara tepat mengakomodasi aspirasi masyarakat dan lingkungan yang berubah secara cepat.

Pusat Pengembangan Penataran Guru Tertulis, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Nasional (2004) menjelaskan bahwa Manajemen Berbasis Sekolah atau MBS adalah terjemahan dari *School Based Managemen* yang merupakan konsep baru dari kebijakan pendidikan Nasional yang sudah dilaksanakan secara nasional. Manajemen Berbasis Sekolah adalah suatu pendekatan pengelolaan sekolah yang dilandasi oleh pemikiran, pertimbangan, kebutuhan dan harapan dari pihak

sekolah dimana sekolah harus tetap berlandaskan pada tuntutan kondisi masyarakat setempat (*bottom up*) dan tidak begitu saja mengikuti petunjuk/aturan birokrat pemerintah secara langsung, yang belum tentu sesuai dengan kondisi atau kebutuhan masyarakat sebenarnya di lapangan (*top down*). Manajemen berbasis sekolah dapat juga diartikan sebagai suatu model pengelolaan pendidikan yang berbasis otonomi atau kemandirian dan pengambilan keputusan partisipatif dengan melibatkan keinginan masyarakat pendukungnya (*stakeholders*). Semua warga sekolah terlibat didalamnya seperti; orang tua peserta didik, pelaku ekonomi, pelaku dalam dunia industri, tokoh masyarakat, lingkungan sosial dan siapa saja yang mempunyai kebutuhan dan harapan untuk meningkatkan mutu atau kualitas pendidikan sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan oleh pemerintah Pusat, Propinsi, Kabupaten dan Kota.

Upaya Untuk mewujudkan keinginan di atas maka pihak-pihak yang terlibat dengan sekolah dapat langsung memberikan aspirasi atau partisipasinya secara bersama-sama untuk dapat merumuskan visi, misi, tujuan dan program-program prioritas sekolah serta sasaran-sasaran lain yang ingin dicapai berdasarkan harapan, keinginan dan kebutuhan pihak-pihak terkait yang mendukung sekolah. Sehingga tujuan akhir MBS yaitu peningkatan mutu pendidikan dapat terlaksana dengan baik.

Selain itu MBS dapat diartikan sebagai wujud dari reformasi pendidikan di Indonesia yang menginginkan adanya perubahan dari kondisi pendidikan yang kurang baik ke kondisi baik dengan memberikan kewenangan (otorita) kepada sekolah untuk memberdayakan dirinya dan untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah sesuai dengan tujuan Pendidikan Nasional. Selanjutnya,

dari pengertian MBS dapat digarisbawahi adanya ciri-ciri MBS seperti berikut ini yaitu: Sekolah memiliki otonomi yang kuat, adanya aspirasi dan partisipasi masyarakat secara aktif, proses pengambilan keputusan yang demokratis dan berkeadilan, dan adanya akuntabilitas dan transparansi dalam setiap kegiatan pendidikan.

Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 51 butir pertama yang didalamnya berisikan tentang Pelaksanaan MBS ditetapkan yang menyatakan bahwa “ pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah melaksanakan prinsip manajemen berbasis sekolah. Kemandirian sekolah dalam Manajemen Berbasis Sekolah merupakan salah satu sasaran dari kebijakan desentralisasi pendidikan. Namun demikian banyak pendidik tetap berpendirian bahwa desentralisasi kewenangan dari pusat ke level sekolah tidak menjamin bahwa sekolah secara otomatis dapat menggunakan kewenangan tersebut secara efektif bagi peningkatan mutu pendidikan. Oleh sebab itu pelaku pendidikan dan masyarakat luas (orang tua siswa terutama) harus membantu mendukung pengambilan keputusan /kebijakaan sekolah.

Pusat Pengembangan Penataran Guru Tertulis, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Nasional (2004) menyatakan tujuan utama MBS adalah untuk meningkatkan efisiensi dan mutu pendidikan. Peningkatan efisiensi dan mutu pendidikan diperoleh melalui kelenturan dalam pengelolaan sekolah yang melibatkan kepala sekolah, guru, staf sekolah dan masyarakat luas. Kerjasama antara kepala sekolah, guru dan masyarakat dalam pengambilan keputusan-keputusan yang berkaitan dengan manajemen sekolah mendorong rasa kepemilikan yang lebih tinggi dari guru

dan masyarakat. Pada akhirnya mereka akan menggunakan sumber daya se efisien mungkin untuk mencapai hasil yang optimal.

Profesionalisme dan akuntabilitas kerja sangat dibutuhkan dalam pengembangan sekolah yang bermutu. Profesionalisme berarti harus dimulai dari pembuatan program kerja, pengorganisasian sekolah serta pengelolaan sekolah.

Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban sekolah dalam melaksanakan program MBS. Pertanggungjawaban yang dimaksud adalah mencakup bagaimana sekolah tetap dan menegakkan : (1) Kesesuaian antara tujuan pendidikan yang telah dirumuskan oleh dinas pendidikan di wilayah otonominya dengan falsafah, moral dan etika yang diakui masyarakat luas, (2) Kesesuaian antara tujuan pendidikan di daerah dengan proses kegiatan serta hasil dan dampak (kompetensi lulusan yang dicapai), (3) Keterbukaan terhadap pihak-pihak luar yang berkepentingan atau yang memiliki kewenangan dengan pendidikan (*stakeholder*) untuk melakukan penilaian atau evaluasi terhadap proses dan hasil pendidikan, (4) Pertanggung jawaban mengenai pemanfaatan sumber daya (finansial maupun insani) dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh sekolah dan (5) Kesadaran personil sekolah dan masyarakat bahwa profesionalisme lebih diutamakan.

Semua keberhasilan dari Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), pada akhirnya ditentukan oleh unsur yang berada di front terdepan yaitu para guru. Guru adalah unsur manusiawi dalam pendidikan dalam mencapai tujuan pendidikan. Guru adalah figur manusia, yang menempati posisi dan memegang peranan penting dalam pendidikan. Tanpa guru, pendidikan hanya akan

menjadi slogan muluk karena segala bentuk kebijakan dan program pada akhirnya akan ditentukan oleh kinerja guru dalam melaksanakannya.

Penerapan MBS membawa pencerahana baru bagi guru karena fokus utama MBS lebih ditekankan pada pemberdayaan sekolah termasuk upaya yang lebih efektif untuk memberdayakan guru dalam berbagai tuntutan dan perubahan. Guru menempati posisi sentral dalam arti pemberdayaan secara profesional dan proporsional. Selama ini upaya peningkatan mutu pendidikan selalu mengabaikan guru (terutama kesejahteraan). Guru sebagai insan pendidikan harus lebih diperankan sebagai subjek dan bukan sebagai objek dengan diperlakukan sebagai mitra dan bukan bawahan.

Penerapan Manajemen pendidikan melalui MBS harus dapat memberikan jaminan agar para guru mendapat mengembangkan ide-idenya dalam tugas/tenaga pendidik untuk mengembangkan dirinya secara profesional sebagai pelaksana pendidikan, khususnya di tingkat instruksional dan institusional dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepada guru. Di samping itu MBS juga dapat memberikan umpan balik terhadap kontribusi guru, termasuk insentif kerja yang memadai sesuai dengan yang dilakukan atau dikerjakan, pengembangan dan ganjaran pengajaran yang baik, memperhitungkan hak-hak guru yang diterimanya untuk berkontribusi dalam pembuatan keputusan yang berkenaan dengan mereka, dan meningkatkan hubungan serta komunikasi yang baik antara guru dengan pihak pendidikan lainnya seperti orang tua dan pengelola serta pejabat pendidikan.

Kepala sekolah dalam pembinaan guru salah satunya dengan mengaktifkan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) yang bertujuan ntuk memberikan kesempatan kepada guru dalam tukar pengalaman dengan guru lain atau

pemandu mata pelajaran. Di samping itu kepala sekolah melakukan supervisi kelas untuk melihat keberhasilan guru dalam pelaksanaan pengajaran demi menunjang profesionalisme guru. Tetapi dalam pelaksanaan MBS menuju pemberdayaan guru belum sepenuhnya berjalan baik. Hal ini disebabkan karena manajemen kepala sekolah yang masih tertutup, kurangnya transparansi antara kepala sekolah dan guru mempengaruhi dalam implementasi MBS dalam memperdayakan guru-guru.

Guru memegang peranan yang amat penting dalam upaya pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan. Namun kenyataannya guru tetap terabaikan dalam perwujudan keberdayaannya sebagai insan pendidikan terutama dalam hal pengembangan diri, kreativitas dan inovasi yang masih kurang.

Dalam penelitian ini memilih Kota Binjai khususnya SMPN I Binjai sebagai objek penelitian salah satunya adalah karena SMPN I Binjai merupakan salah satu Rintisan Sekolah Berstandar Intenasional (RSBI) yang telah menerapkan MBS. SMPN I Binjai yang merupakan SMP unggulan di Kota Binjai memiliki keunggulan yang menjadikan SMP tersebut menjadi sekolah vavorit. Beberapa keunggulan yang dimiliki SMPN I Binjai sebagai SMP Rintisan Sekolah Berstandar Internasional (RSBI) adalah: Sistem pendidikan yang terintegrasi, kurikulum terpadu KTSP (Nasional dan Internasional), konsep belajar dengan empat pilar, penerapan informasi teknologi terpadu dan up to date, siswa mendapat remedial/pengayaan, kegiatan ekstra kurikuler yang bervariasi, tenaga pendidik/kependidikan yang berdedikasi dan profesional, sarana dan prasarana yan baik, lingkungan yang startegis, hasil monitoring Direktorat Pembinaan SMP Dirjen Manajemen

Dikdasmen dengan predikat A dan hasil ujian nasional level A serta hasil akreditasi dari BAS dengan predikat A.

Selanjutnya berdasarkan masalah yang diuraikan diatas, maka peneliti mempertimbangkan bahwa implementasi MBS dalam pembedayaan guru merupakan salah satu kajian yang menarik untuk diteliti secara ilmiah. Sebelum membahas masalah tersebut lebih mendalam, peneliti telah melakukan pengamatan menyeluruh (*Grand-tour observation*) dengan mengunjungi langsung SMPN 1 Kota Binjai. Dari hasil observasi umum selama dua bulan, pada bulan Agustus dan September 2010 penulis berhasil mengidentifikasi gejala-gejala umum sebagai berikut:

- a. Kepala sekolah belum bersifat demokratis , sehingga segala keputusan mengenai manajemen pendidikan sekolah didominasi oleh kepala sekolah.
- b. Transparansi anggaran pendidikan sekolah yang dilakukan oleh kepala sekolah masih belum bersifat terbuka, guru tidak mengetahui hal-hal mengenai keuangan sekolah, karena guru tidak memiliki peran dalam hal keuangan sekolah.
- c. Keputusan dalam pengambilan pendapat dalam rapat guru dengan kepala sekolah di lakukan dengan musyawarah, namun keputusan tetap berada pada kepala sekolah. Kepala sekolah tetap menjadi penentu dalam pengambilan keputusan sekolah
- d. Penghargaan terhadap guru tidak terlaksana karena hanya wakil kepala sekolah dan wakil kepala sekolah bidang kurikulum saja yang lebih banyak terlibat dalam kegiatan program sekolah, sehingga guru yang lainnya hanya sekedar menjalankan tugas rutinitas saja

- e. Paradigma sebahagian guru yang belum berubah dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang begitu pesat, menuntut guru untuk lebih kreatif dalam mengembangkan pengetahuan dengan banyak belajar
- f. Supervisi yang dilakukan kepala sekolah dalam peningkatan profesional guru belum terwujud, supervisi dilakukan hanya dua kali dalam setahun dan bersifat insidental atau tidak terprogram dengan baik.

B. Kerangka Konseptual Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas dan hasil pengamatan awal di sekolah maka dapat diuraikan kerangka konseptual yang terkait dengan fokus penelitian di antaranya adalah sebagai berikut:

- a. Guru belum berperan aktif dalam pelaksanaan program sekolah karena program sekolah banyak yang didominasi oleh kepala sekolah, sehingga kesempatan guru dalam pengembangan ide-ide demi keefektifan sekolah kurang terlaksana.
- b. Guru belum berperan aktif dalam penyediaan sarana dan prasarana sekolah karena masih didominasi oleh kepala sekolah
- c. Guru belum terlibat sepenuhnya dalam hal keuangan sekolah, sehingga guru tidak mengetahui sumber pendapatan dan belanja sekolah
- d. Kepala sekolah masih mendominasi program yang berkaitan dengan kesiswaan dan ketenagaan
- e. Peran guru dalam Proses Belajar Mengajar (PBM) belum terlaksana dengan baik, karena guru masih banyak guru mengajar dengan paradigma lama

- f. Kepala sekolah belum memberdayakan guru sepenuhnya dalam pelaksanaan program sekolah, sehingga masih tidak terlibat dalam pengembangan program sekolah.
- g. Kepala sekolah belum sepenuhnya memahami prinsip-prinsip pengembangan sekolah berdasarkan manajemen berbasis sekolah
- h. Implementasi manajemen berbasis sekolah belum terlaksana sepenuhnya berdasarkan prinsip-prinsip umum MBS

C. Fokus Masalah

Berdasarkan penelitian pendahuluan (*grand Tour*) di SMPN I Kota Binjai diperoleh informasi bahwa SMPN I Binjai telah melaksanakan implementasi manajemen berbasis sekolah. Untuk itulah peneliti merasa tertarik untuk meneliti tentang Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dalam pemberdayaan guru di SMPN I Kota Binjai.

Berdasarkan uraian pada permasalahan di atas, penulis menetapkan fokus masalah. Fokus masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Pemberdayaan guru dalam program sekolah
2. Pemberdayaan guru dalam penyediaan sarana dan prasarana
3. Transparansi pertanggung jawaban keuangan di SMPN 1 Binjai
4. Pemberdayaan guru dalam program kesiswaan dan ketenagaan
5. Pemberdayaan guru dalam proses belajar mengajar
6. Upaya yang dilakukan kepala sekolah dalam pembinaan guru

Hal ini didasari oleh sudah seluruhnya guru mendapatkan penataran tentang konsep dasar manajemen berbasis sekolah dan strategi implementasinya, baik yang diselenggarakan oleh Lembaga Penjamin Mutu

Pendidikan (LPMP), maupun oleh Dinas Pendidikan Kota Binjai. Bahkan diantaranya ada yang ditatar di tingkat nasional.

D. Pertanyaan Penelitian

Implementasi adalah pelaksanaan program Manajemen Berbasis Sekolah. Manajemen Berbasis Sekolah adalah proses manajemen sekolah yang diarahkan pada peningkatan mutu pendidikan secara otonomi, direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi dengan melibatkan semua *stakeholder* sekolah. Sekolah diharapkan dapat lebih mandiri dan menyusun serta mengembangkan tujuan pendidikan yang diharapkan. Manajemen Berbasis sekolah memberi kesempatan kepada sekolah untuk berkembang sesuai dengan harapan masyarakat dan peserta didik. Melalui pelaksanaan manajemen berbasis sekolah yang tepat dan sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen berbasis sekolah maka diharapkan sekolah lebih dapat mengembangkan kemampuannya dalam meningkatkan mutu pendidikan peserta didiknya.

Berdasarkan pembatasan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian adalah “Bagaimana implementasi pemberdayaan guru dalam Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di SMPN 1 Kota Binjai “. Dari permasalahan umum maka muncul beberapa pertanyaan-pertanyaan menyangkut penelitian yaitu tentang :

- a) Bagaimana peran guru dalam pelaksanaan program sekolah di SMPN 1 Kota Binjai?
- b) Bagaimanakah peran guru dalam penyediaan sarana dan prasarana sekolah di SMPN 1 Kota Binjai?
- c) Bagaimanakah peran guru dalam pengelolaan keuangan sekolah?

- d) Bagaimanakah peran guru dalam kegiatan kesiswaan dan peningkatan ketenagaan?
- e) Bagaimanakah peran guru dalam Proses Belajar Mengajar (PBM) di SMPN 1 Kota Binjai?
- f) Bagaimana upaya kepala sekolah dalam pembinaan guru di SMPN 1 Kota Binjai?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Tujuan Umum

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk melakukan penilaian secara ilmiah, objektif, dan empiris tentang implementasi manajemen berbasis sekolah dalam memberdayakan guru

b. Tujuan Khusus

Berdasarkan latar belakang masalah dan perumusan masalah, secara khusus penelitian ini bertujuan :

- (a) Untuk mengetahui peran guru dalam pelaksanaan program sekolah di SMPN 1 Binjai,
- (b) Untuk mengetahui peran guru dalam penyediaan sarana dan prasarana sekolah di SMPN 1 Binjai
- (c) Untuk mengetahui peran guru dalam keuangan sekolah
- (d) Untuk mengetahui peran guru dalam kesiswaan dan ketenagaan
- (e) Untuk mengetahui peran guru dalam proses belajar mengajar

- (d) Untuk mengetahui upaya kepala sekolah dalam memberdayakan guru di SMPN 1 Binjai

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada : Kepala Dinas Pendidikan Kota Binjai, Kepala Sekolah, Guru dan peneliti. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan kajian dalam upaya untuk mendalami Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah dalam pemberdayaan guru di suatu lembaga pendidikan tingkat menengah, khususnya SMPN 1 Binjai. Selanjutnya temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi terhadap rencana pengembangan sekolah (RPS) khususnya pengembangan manajemennya.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap upaya peningkatan Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah di SMPN 1 Binjai. Secara terinci, hasil penelitian ini diharapkan berguna :

1). Kepala Dinas Pendidikan Kota Binjai

Kepala Dinas Pendidikan dapat memberikan kebebasan kepada sekolah untuk mengembangkan program sekolah sesuai dengan kebutuhan sekolah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan acuan bagi dinas

pendidikan Kota Binjai untuk mendorong baik moril maupun spritual dalam mengembangkan manajemen berbasis sekolah terutama di Kota Binjai

2) Kepala sekolah

Kepala sekolah dalam memimpin sekolah dapat mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam mengembangkan program sekolah sesuai dengan pronsip-prinsip MBS. Kepala Sekolah sebagai pimpinan di SMPN 1 dalam menjalankan fungsi dan tugasnya sesuai dengan tuntutan otonomi daerah, kepala sekolah SMPN 1 Binjai sebagai top manager di sekolah dapat meningkatkan akuntabilitas, demokrasi dan keterbukaan dengan personil sekolah khususnya guru sesuai dengan prinsi-prinsip MBS

3). Guru

Dapat menjadi masukan dan acuan dalam meningkatkan peran serta dalam pengembangan, perancangan dan pelaksanaan program sekolah serta meningkatkan kualitas guru dalam pembelajaran

4). Peneliti

Sebagai bahan perbandingan untuk penelitian yang relevan di kemudian hari

MILIK PERPUSTAKAAN
UNIMED